

Katalog BPS : 3205008.

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN TAHUN 2007



Buku 1 : Provinsi



Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia



DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN TAHUN 2007

<https://www.bps.go.id>

BUKU 1: PROVINSI



Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN TAHUN 2007

BUKU 1: PROVINSI

ISBN : 978-979-724-932-8

ISBN : 978-979-724-933-5

Katalog BPS : 3205008

No. Publikasi : 07310.0802

Ukuran buku : 16,5 cm x 22 cm

Naskah :

Sub Direktorat Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

KEMISKINAN

PENDIDIKAN

<https://www.pps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

KESEHATAN

FASILITAS PERUMAHAN

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Di Indonesia, persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menyajikan data dan informasi kemiskinan serta faktor-faktor yang terkait.

Buku 1 (satu) Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007 Provinsi, berisi data dan informasi mengenai kemiskinan dan indikator serta variabel lain yang terkait dengan masalah kemiskinan untuk tingkat Provinsi.

Buku 2 (dua) Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007 Kabupaten/Kota, berisi data dan informasi mengenai kemiskinan dan indikator serta variabel lain yang terkait dengan masalah kemiskinan untuk tingkat Kabupaten/Kota. Data dan informasi yang ada dalam kedua publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari data Susenas 2007

Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengguna data dan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2008
Kepala Badan Pusat Statistik,

Dr. Rusman Heriawan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN PENULISAN	1
III. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI	2
IV. KONSEP DAN DEFINISI	6
V. ULASAN SINGKAT	7
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2005	11
Tabel 1.1.b. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006	12
Tabel 1.1.c. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007	13
Tabel 1.2.a. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2005	14
Tabel 1.2.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006	15
Tabel 1.2.c. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007	16
Tabel 1.3.a. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2005	17
Tabel 1.3.b. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006	18
Tabel 1.3.c. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007	19
Tabel 1.4.a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2005	20
Tabel 1.4.b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006	21
Tabel 1.4.c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007	22
Tabel 1.5. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2007	23
Tabel 1.6. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Kepala Rumahtangga Tahun 2007	24
Tabel 1.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Pendidikan Kepala Rumahtangga Tahun 2007	25
Tabel 1.8. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Kepala Rumahtangga Tahun 2007	26
Tabel 1.9. Jumlah dan Disribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Kepala Rumahtangga Tahun 2007	27
Tabel 2.1.a. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007, Miskin	29
Tabel 2.1.b. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007, Tidak Miskin	30
Tabel 2.1.c. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007, Miskin + Tidak Miskin	31
Tabel 2.2. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 7-12 Menurut Provinsi Tahun 2007	32
Tabel 2.3. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 13-15 Menurut Provinsi Tahun 2007	33

Tabel 3.1.	Persentase Pekerja Informal Menurut Provinsi Tahun 2007.....	35
Tabel 4.1.a.	Persentase Balita Yang Diimunisasi Menurut Provinsi Tahun 2007, Miskin.....	37
Tabel 4.1.b.	Persentase Balita Yang Diimunisasi Menurut Provinsi Tahun 2007, Tidak Miskin.	38
Tabel 4.1.c.	Persentase Balita Yang Diimunisasi Menurut Provinsi Tahun 2007, Miskin + Tidak Miskin.....	39
Tabel 4.2.a.	Persentase Penolong Persalinan Pertama Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2007.....	40
Tabel 4.2.b.	Persentase Penolong Persalinan Terakhir Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2007.....	41
Tabel 4.3.	Persentase Pengguna Alat KB Menurut Provinsi Tahun 2007	42
Tabel 5.1.a	Persentase Rumahtangga Yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/Bersama Menurut Provinsi Tahun 2007, Miskin	43
Tabel 5.1.b	Persentase Rumahtangga Yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/Bersama Menurut Provinsi Tahun 2007, Tidak Miskin	44
Tabel 5.1.c	Persentase Rumahtangga Yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/Bersama Menurut Provinsi Tahun 2007, Miskin +Tidak Miskin	45

Tim Penyusun

Penanggung jawab/Pengarah : Wiwiek Arumwaty S, M.Si

Koordinator : DR. Kecuk Suhariyanto

Anggota : 1. Ahmad Avenzora

2. Yoyo Karyono

3. Rustam

4. Nursahrizal

<https://www.bps.go.id>

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN 2007

I. PENDAHULUAN

- Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
- Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Susenas. Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi.

II. TUJUAN PENULISAN

- Mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah (perkotaan-perdesaan) tahun 2007.
- Mengetahui karakteristik rumahtangga miskin dan tidak miskin menurut provinsi dan daerah (perkotaan-perdesaan) tahun 2007.

III. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI

Konsep:

- Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Sumber Data:

- Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor pada Maret 2007 dengan jumlah sampel 68.000 rumah tangga. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

Garis Kemiskinan:

- Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

- Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan:

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_k$$

dimana:

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j .

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j .

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j .

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

dimana:

K_{jk} = kalori dari komoditi k di daerah j

$\overline{HK}_j$ = harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

dimana:

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

- Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan.

Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumahtangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

dimana :

- NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah p (GKNM_p).
- V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).
- r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPKKD 2004).
- i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p .
- p = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Indikator Kemiskinan:

- *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana: α = 0, 1, 2

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2).

IV. KONSEP DAN DEFINISI

Pendidikan:

- **Angka melek huruf (dewasa)** adalah proporsi seluruh penduduk (miskin + tidak miskin) berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf menurut kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan disini adalah melek huruf latin dan huruf lainnya.
- **Angka partisipasi sekolah** adalah proporsi dari seluruh penduduk (miskin + tidak miskin) dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.
- **Angka putus sekolah** adalah proporsi dari penduduk berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama. Publikasi ini menyajikan angka putus sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang dapat dianggap sebagai suatu insiden kemiskinan dimana tercermin dari ketidakmampuan rumah tangga tersebut dalam memenuhi kebutuhan minimum di bidang pendidikan.

Ketenagakerjaan:

- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu.
- **Pekerja informal** adalah penduduk yang bekerja dengan status/kedudukan pekerjaannya sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja tidak dibayar.

Kesehatan:

- **Imunisasi atau vaksinasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.
- Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi adalah pelayanan proses persalinan. Keberhasilan proses persalinan sangat tergantung kepada petugas atau tenaga penolong yang menanganinya. Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh dokter atau bidan.

Oleh karena itu, data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

- **Alat atau cara Keluarga Berencana (KB):**
 - a) Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi
 - b) Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi
 - c) AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim)/IUD/spiral
 - d) Suntikan KB
 - e) Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit (alat kontrasepsi bawah kulit)
 - f) Pil KB
 - g) Kondom/karet KB
 - h) Intravag/tissue/kondom wanita
 - i) Alat/cara KB tradisional, antara lain: pantang berkala/sistim kalender, senggama terputus, tidak campur (puasa), jamu, urut.

Fasilitas Perumahan:

- **Rumahtangga pengguna air bersih** adalah persentase rumahtangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindung (dengan jarak ke penampungan lebih dari 10 meter).
- **Jamban** adalah fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga.

V. ULASAN SINGKAT

KEMISKINAN:

Pada Juli 2005 jumlah penduduk miskin secara nasional tercatat sebesar 36,8 juta jiwa atau 16,69 persen dari total penduduk Indonesia (Tabel 1.1.a). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin secara nasional meningkat sebesar 1,81 persen. Begitu pula pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin secara nasional meningkat 6,77 persen dibanding tahun 2005 menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia (Tabel 1.1.b), sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan 5,41 persen dibanding tahun 2006 menjadi 37,2 juta jiwa (Tabel 1.1.c). Bila dilihat menurut daerah, persentase penduduk miskin di perdesaan (20,63 persen) lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (12,48 persen) pada tahun 2005. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam periode 2004-2005 terjadi peningkatan penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 16,96 persen, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 5,14 persen. Begitu pula pada tahun 2006 penduduk miskin di perdesaan (21,81 persen) lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (13,47 persen). Dalam periode 2005-2006 terjadi peningkatan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, dimana masing-masing daerah mengalami peningkatan sebesar 8,96

persen dan 5,54 persen. Pada tahun 2007 penduduk miskin di pedesaan (20,37 persen) lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (12,52 persen). Sedangkan dalam periode 2006-2007 terjadi penurunan baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan, dimana masing-masing daerah mengalami penurunan sebesar 6,42 persen dan 4,83 persen.

Dari angka kemiskinan tahun 2005 antar provinsi terlihat bahwa ada enam provinsi yang dapat dikategorikan memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (angkanya berada di bawah *hard core*, yaitu di bawah 10 persen). Keenam provinsi tersebut adalah Provinsi Bangka Belitung (9,74 persen), Provinsi Sulawesi Utara (9,34 persen), Provinsi Banten (8,86 persen), Provinsi Kalimantan Selatan (7,23 persen), Provinsi Bali (6,72 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (3,61 persen). Sedangkan pada tahun 2006 hanya ada empat yaitu Provinsi Banten (9,79 persen), Provinsi Kalimantan Selatan (8,32 persen), Provinsi Bali (7,08 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (4,57 persen). Pada tahun 2007 kembali menjadi enam yaitu Provinsi Bangka Belitung (9,54 persen), Provinsi Kalimantan Tengah (9,38 persen), Provinsi Banten (9,07 persen), Provinsi Kalimantan Selatan (7,01 persen), Provinsi Bali (6,63 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (4,61 persen). Dua provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar (di atas 30 persen) pada tahun 2005 adalah Provinsi Papua (40,83 persen) dan Provinsi Maluku (32,28 persen), sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 ada tiga provinsi yaitu Papua (41,52 dan 40,78 persen), provinsi Papua Barat (41,34 dan 39,31 persen) dan Provinsi Maluku (33,03 dan 31,14 persen).

Dari Tabel 1.2.a – 1.2.c dapat dilihat distribusi penduduk miskin secara nasional pada tahun 2005 - 2007 menurut daerah. Distribusi secara nasional pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 36,13 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 63,87 persen sisanya berada di daerah pedesaan, pada tahun 2006 36,87 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 63,13 persen berada di daerah pedesaan, dan pada tahun 2007 36,48 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 63,52 persen berada di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan.

PENDIDIKAN:

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan dituangkan dalam UUD 1945 dan GBHN dimana dinyatakan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa jauh kesempatan memperoleh pendidikan telah dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Beberapa indikator pendidikan disajikan pada Tabel 2.1.a – Tabel 2.3.

Pada tahun 2007 Angka Melek Huruf di Indonesia untuk kelompok usia 15-24 tahun yang tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta (99,78 persen). Sementara itu yang terendah terdapat di provinsi Papua yaitu sebesar 86,21 persen. Begitu pula

untuk kelompok usia 15-55 tahun yang tertinggi juga ada di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 99,23 persen dan terendah terdapat di provinsi Papua yaitu sebesar 75,20 persen.

Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS pada kelompok usia 7-12 tahun relatif sudah cukup merata di seluruh provinsi yaitu sudah mencapai lebih dari 90 persen kecuali untuk provinsi Papua yang hanya sebesar 83,34 persen pada tahun 2007. Berbeda dengan kelompok usia 7-12, APS pada kelompok usia 13-15 tahun terlihat cukup bervariasi antar provinsi. Sebagai contoh, pada tahun 2007 tercatat APS yang paling tinggi ada di provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebesar 93,90 persen dan yang terendah tercatat di provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 74,56 persen.

Pada tahun 2007, angka putus sekolah di Indonesia untuk kelompok usia 7-12 tahun adalah sebesar 0,67 persen dan kelompok usia 13-15 tahun adalah sebesar 4,21 persen.

KETENAGAKERJAAN:

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Karenanya persaingan di dunia ketenagakerjaan tidak dapat dihindarkan, karena bagaimanapun mereka yang memiliki kualifikasi lebih baik tentu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Problematika inilah yang tampaknya masih menjadi perhatian pemerintah dimana bertambahnya tenaga kerja yang tersedia tidak diikuti oleh makin luasnya lapangan kerja yang akan menampungnya. Pemerataan kesempatan kerja bagi setiap penduduk sangatlah penting karenanya menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan. Untuk itu data mengenai indikator ketenagakerjaan sangatlah diperlukan bagi perencanaan di bidang ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan yang disajikan disini hanya penduduk pekerja informal.

Informasi mengenai penduduk yang bekerja di sektor informal disajikan pada Tabel 3.1. Berdasarkan penghitungan dari data Susenas 2007, pekerja sektor informal sebesar 60,06 persen. Angka tertinggi tercatat ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 84,08 persen, sedangkan yang terendah tercatat di DKI Jakarta yaitu 32,78 persen.

KESEHATAN:

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan masyarakat tersebut karena masyarakat yang sehatlah yang mampu berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi kesehatan dapat ditinjau dari sisi individu, keluarga dan lingkungan. Beberapa indikator kesehatan di tingkat individu adalah seperti pemberian imunisasi pada balita, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, dan keikutsertaan KB.

Tabel 4.1.a – 4.1.b menjelaskan tentang pemberian imunisasi terhadap balita menurut provinsi pada tahun 2007. Secara nasional balita yang telah menerima imunisasi BCG pada tahun 2007 tercatat sebesar 90,85 persen. Balita yang telah menerima imunisasi DPT dan polio masing-masing tercatat sebesar 87,87 persen dan 91,17 persen. Sedangkan balita yang telah menerima imunisasi campak 77,15 persen dan balita yang telah menerima imunisasi hepatitis-B sebesar 81,90 persen.

FASILITAS PERUMAHAN:

Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah dan lingkungan yang sehat, tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan seluruh anggota rumahtangga yang menempatinnya. Ada beberapa indikator perumahan yang menunjukkan rumah sehat antara lain: air bersih dan jamban sendiri/bersama.

Pada tahun 2007, secara nasional rumahtangga yang menggunakan air bersih adalah sebesar 48,72 persen. Lebih jauh dapat dilihat bahwa rumahtangga yang menggunakan air bersih terendah pada tahun 2007 tercatat ada di provinsi Kalimantan Barat 16,19 persen, sedangkan yang terbanyak ada di provinsi DKI Jakarta 80,36 persen.

Rumahtangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama secara nasional pada tahun 2007 ada sebanyak 72,81 persen. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang terbanyak rumahtangganya yang menggunakan jamban sendiri/bersama (93,06 persen) pada tahun 2007, sedangkan terendah ada di provinsi Gorontalo (48,02 persen).

**Tabel 1.1.a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2005**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	222.9	19.04	943.5	32.60	1166.4	28.69
Sumatera Utara	732.3	12.67	1107.9	16.40	1840.2	14.68
Sumatera Barat	189.3	12.45	293.5	10.08	482.8	10.89
Riau	199.9	8.26	400.5	16.82	600.4	12.51
Jambi	143.7	16.58	174.1	9.63	317.8	11.88
Sumatera Selatan	557.8	21.19	871.2	20.90	1429.0	21.01
Bengkulu	142.4	24.84	218.8	20.74	361.2	22.18
Lampung	405.6	20.46	1167.0	21.78	1572.6	21.42
Bangka Belitung	37.7	8.05	57.6	11.28	95.3	9.74
Kepulauan Riau	70.1	9.83	77.9	12.26	148.0	10.97
DKI Jakarta	316.2	3.61	0.0	0.00	316.2	3.61
Jawa Barat	2444.7	10.57	2692.9	16.62	5137.6	13.06
Jawa Tengah	2671.2	17.24	3862.3	23.57	6533.5	20.49
DI Yogyakarta	340.3	16.02	285.5	24.23	625.8	18.95
Jawa Timur	2716.4	15.52	4423.5	24.19	7139.9	19.95
Banten	370.2	6.56	460.3	12.34	830.5	8.86
Bali	105.9	5.40	122.5	8.51	228.4	6.72
Nusa Tenggara Barat	575.3	31.31	561.2	22.03	1136.5	25.92
Nusa Tenggara Timur	133.5	17.85	1037.7	30.46	1171.2	28.19
Kalimantan Barat	171.6	13.95	458.2	14.35	629.8	14.24
Kalimantan Tengah	48.5	6.62	182.4	12.84	230.9	10.73
Kalimantan selatan	82.4	6.09	153.3	8.03	235.7	7.23
Kalimantan Timur	106.0	6.02	193.1	18.06	299.1	10.57
Sulawesi Utara	46.4	4.96	155.0	12.70	201.4	9.34
Sulawesi Tengah	73.2	14.41	454.3	23.76	527.5	21.80
Sulawesi Selatan	182.0	6.61	1098.6	18.95	1280.6	14.98
Sulawesi Tenggara	37.2	7.70	413.3	25.56	450.5	21.45
Gorontalo	47.3	17.23	207.7	34.43	255.0	29.05
Maluku	45.1	13.57	366.4	38.89	411.5	32.28
Maluku Utara	29.3	10.99	89.3	14.17	118.6	13.23
Papua	53.0	9.23	975.2	50.16	1028.2	40.83
Indonesia	13297.4	12.48	23504.7	20.63	36802.1	16.69

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2005

**Tabel 1.1.b. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2006**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	226.9	19.22	922.8	31.98	1149.7	28.28
Sumatera Utara	863.6	14.73	1033.5	15.25	1897.1	15.01
Sumatera Barat	189.8	11.87	389.0	12.85	578.7	12.51
Riau	226.3	9.37	338.6	14.40	564.9	11.85
Jambi	142.5	16.30	162.1	8.98	304.6	11.37
Sumatera Selatan	599.5	22.32	847.4	20.14	1446.9	20.99
Bengkulu	134.5	24.24	225.5	22.32	360.0	23.00
Lampung	398.6	20.35	1239.4	23.67	1638.0	22.77
Bangka Belitung	46.6	9.01	70.8	12.67	117.4	10.91
Kepulauan Riau	82.7	11.61	80.3	12.79	163.0	12.16
DKI Jakarta	407.1	4.57	0.0	0.00	407.1	4.57
Jawa Barat	2777.1	11.90	2935.4	18.16	5712.5	14.49
Jawa Tengah	2958.1	18.90	4142.5	25.28	7100.6	22.19
DI Yogyakarta	346.0	17.85	302.7	27.64	648.7	19.15
Jawa Timur	2836.3	15.85	4841.8	26.11	7678.1	21.09
Banten	417.1	7.47	487.1	13.34	904.3	9.79
Bali	127.4	6.40	116.0	8.03	243.5	7.08
Nusa Tenggara Barat	573.3	31.95	582.8	23.69	1156.1	27.17
Nusa Tenggara Timur	148.0	18.77	1125.9	31.68	1273.9	29.34
Kalimantan Barat	151.0	13.10	475.7	16.07	626.7	15.24
Kalimantan Tengah	52.9	7.97	159.9	12.57	212.8	11.00
Kalimantan selatan	102.6	7.35	175.8	9.03	278.5	8.32
Kalimantan Timur	127.3	6.93	208.1	18.85	335.5	11.41
Sulawesi Utara	66.2	7.01	183.2	15.05	249.4	11.54
Sulawesi Tengah	71.5	14.40	482.0	26.10	553.5	23.63
Sulawesi Selatan	167.8	6.83	944.2	18.25	1112.0	14.57
Sulawesi Tenggara	29.9	6.46	436.8	28.47	466.8	23.37
Gorontalo	41.2	13.90	232.6	36.14	273.8	29.13
Sulawesi Barat	57.5	17.26	147.7	22.50	205.2	20.74
Maluku	46.2	13.86	372.4	39.87	418.6	33.03
Maluku Utara	20.7	7.53	96.1	14.95	116.8	12.73
Papua Barat	13.3	8.42	270.8	51.17	284.1	41.34
Papua	39.4	8.71	777.3	51.31	816.7	41.52
Indonesia	14489.0	13.47	24806.3	21.81	39295.3	17.75

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2006

**Tabel 1.1.c. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	218.8	18.68	864.9	29.87	1083.7	26.65
Sumatera Utara	833.5	14.21	935.0	13.63	1768.5	13.90
Sumatera Barat	149.2	9.78	380.0	13.01	529.2	11.90
Riau	246.4	9.53	328.1	12.90	574.5	11.20
Jambi	137.2	15.42	144.7	7.81	281.9	10.27
Sumatera Selatan	545.9	20.30	785.9	18.43	1331.8	19.15
Bengkulu	135.6	23.00	235.0	21.66	370.6	22.13
Lampung	366.0	18.11	1295.7	23.70	1661.7	22.19
Bangka Belitung	38.6	8.09	56.5	10.87	95.1	9.54
Kepulauan Riau	76.8	10.08	71.6	10.54	148.4	10.30
DKI Jakarta	405.7	4.61	0.0	0.00	405.7	4.61
Jawa Barat	2654.6	11.21	2803.3	16.88	5457.9	13.55
Jawa Tengah	2687.3	17.23	3869.9	23.45	6557.2	20.43
DI Yogyakarta	335.3	15.63	298.2	25.03	633.5	18.99
Jawa Timur	2575.7	14.71	4579.6	25.02	7155.3	19.98
Banten	399.4	6.79	486.8	12.52	886.2	9.07
Bali	119.8	6.01	109.3	7.47	229.1	6.63
Nusa Tenggara Barat	570.9	30.44	547.7	21.06	1118.6	24.99
Nusa Tenggara Timur	124.9	16.41	1038.7	29.95	1163.6	27.51
Kalimantan Barat	144.1	11.45	440.2	13.47	584.3	12.91
Kalimantan Tengah	51.2	6.72	159.1	10.76	210.3	9.38
Kalimantan selatan	83.1	6.01	150.4	7.72	233.5	7.01
Kalimantan Timur	136.1	7.44	188.7	16.98	324.8	11.04
Sulawesi Utara	79.0	8.31	171.1	13.80	250.1	11.42
Sulawesi Tengah	67.1	12.86	490.3	24.97	557.4	22.42
Sulawesi Selatan	152.8	6.18	930.6	17.87	1083.4	14.11
Sulawesi Tenggara	31.3	6.24	434.1	25.84	465.4	21.33
Gorontalo	30.7	11.08	211.2	34.76	241.9	27.35
Sulawesi Barat	55.1	16.53	134.8	20.29	189.9	19.03
Maluku	49.1	14.49	355.6	37.02	404.7	31.14
Maluku Utara	11.7	4.29	98.2	15.22	109.9	11.97
Papua Barat	11.0	7.14	255.8	48.82	266.8	39.31
Papua	35.4	7.97	758.0	50.47	793.4	40.78
Indonesia	13559.3	12.52	23609.0	20.37	37168.3	16.58

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.2.a. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2005**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	222.9	19.11	943.5	80.89	1166.4	100.00
Sumatera Utara	732.3	39.79	1107.9	60.21	1840.2	100.00
Sumatera Barat	189.3	39.21	293.5	60.79	482.8	100.00
Riau	199.9	33.29	400.5	66.71	600.4	100.00
Jambi	143.7	45.22	174.1	54.78	317.8	100.00
Sumatera Selatan	557.8	39.03	871.2	60.97	1429.0	100.00
Bengkulu	142.4	39.42	218.8	60.58	361.2	100.00
Lampung	405.6	25.79	1167.0	74.21	1572.6	100.00
Bangka Belitung	37.7	39.56	57.6	60.44	95.3	100.00
Kepulauan Riau	70.1	47.36	77.9	52.64	148.0	100.00
DKI Jakarta	316.2	100.00	0.0	0.00	316.2	100.00
Jawa Barat	2444.7	47.58	2692.9	52.42	5137.6	100.00
Jawa Tengah	2671.2	40.88	3862.3	59.12	6533.5	100.00
DI Yogyakarta	340.3	54.38	285.5	45.62	625.8	100.00
Jawa Timur	2716.4	38.05	4423.5	61.95	7139.9	100.00
Banten	370.2	44.58	460.3	55.42	830.5	100.00
Bali	105.9	46.37	122.5	53.63	228.4	100.00
Nusa Tenggara Barat	575.3	50.62	561.2	49.38	1136.5	100.00
Nusa Tenggara Timur	133.5	11.40	1037.7	88.60	1171.2	100.00
Kalimantan Barat	171.6	27.25	458.2	72.75	629.8	100.00
Kalimantan Tengah	48.5	21.00	182.4	79.00	230.9	100.00
Kalimantan selatan	82.4	34.96	153.3	65.04	235.7	100.00
Kalimantan Timur	106.0	35.44	193.1	64.56	299.1	100.00
Sulawesi Utara	46.4	23.04	155.0	76.96	201.4	100.00
Sulawesi Tengah	73.2	13.88	454.3	86.12	527.5	100.00
Sulawesi Selatan	182.0	14.21	1098.6	85.79	1280.6	100.00
Sulawesi Tenggara	37.2	8.26	413.3	91.74	450.5	100.00
Gorontalo	47.3	18.55	207.7	81.45	255.0	100.00
Maluku	45.1	10.96	366.4	89.04	411.5	100.00
Maluku Utara	29.3	24.70	89.3	75.30	118.6	100.00
Papua	53.0	5.15	975.2	94.85	1028.2	100.00
Indonesia	13297.4	36.13	23504.7	63.87	36802.1	100.00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2005

**Tabel 1.2.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2006**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	226.9	19.73	922.8	80.27	1149.7	100.00
Sumatera Utara	863.6	45.52	1033.5	54.48	1897.1	100.00
Sumatera Barat	189.8	32.79	389.0	67.21	578.7	100.00
Riau	226.3	40.06	338.6	59.94	564.9	100.00
Jambi	142.5	46.78	162.1	53.22	304.6	100.00
Sumatera Selatan	599.5	41.43	847.4	58.57	1446.9	100.00
Bengkulu	134.5	37.36	225.5	62.64	360.0	100.00
Lampung	398.6	24.33	1239.4	75.67	1638.0	100.00
Bangka Belitung	46.6	39.72	70.8	60.28	117.4	100.00
Kepulauan Riau	82.7	50.76	80.3	49.24	163.0	100.00
DKI Jakarta	407.1	100.00	0.0	0.00	407.1	100.00
Jawa Barat	2777.1	48.61	2935.4	51.39	5712.5	100.00
Jawa Tengah	2958.1	41.66	4142.5	58.34	7100.6	100.00
DI Yogyakarta	346.0	53.34	302.7	46.66	648.7	100.00
Jawa Timur	2836.3	36.94	4841.8	63.06	7678.1	100.00
Banten	417.1	46.13	487.1	53.87	904.3	100.00
Bali	127.4	52.34	116.0	47.66	243.5	100.00
Nusa Tenggara Barat	573.3	49.59	582.8	50.41	1156.1	100.00
Nusa Tenggara Timur	148.0	11.62	1125.9	88.38	1273.9	100.00
Kalimantan Barat	151.0	24.09	475.7	75.91	626.7	100.00
Kalimantan Tengah	52.9	24.84	159.9	75.16	212.8	100.00
Kalimantan selatan	102.6	36.86	175.8	63.14	278.5	100.00
Kalimantan Timur	127.3	37.96	208.1	62.04	335.5	100.00
Sulawesi Utara	66.2	26.54	183.2	73.46	249.4	100.00
Sulawesi Tengah	71.5	12.91	482.0	87.09	553.5	100.00
Sulawesi Selatan	167.8	15.09	944.2	84.91	1112.0	100.00
Sulawesi Tenggara	29.9	6.41	436.8	93.59	466.8	100.00
Gorontalo	41.2	15.05	232.6	84.95	273.8	100.00
Sulawesi Barat	57.5	28.02	147.7	71.98	205.2	100.00
Maluku	46.2	11.04	372.4	88.96	418.6	100.00
Maluku Utara	20.7	17.71	96.1	82.29	116.8	100.00
Papua Barat	13.3	4.68	270.8	95.32	284.1	100.00
Papua	39.4	4.82	777.3	95.18	816.7	100.00
Indonesia	14489.0	36.87	24806.3	63.13	39295.3	100.00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2006

Data dan Informasi Kemiskinan 2007

**Tabel 1.2.c. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	218.8	20.19	864.9	79.81	1083.7	100.00
Sumatera Utara	833.5	47.13	935.0	52.87	1768.5	100.00
Sumatera Barat	149.2	28.19	380.0	71.81	529.2	100.00
Riau	246.4	42.89	328.1	57.11	574.5	100.00
Jambi	137.2	48.67	144.7	51.33	281.9	100.00
Sumatera Selatan	545.9	40.99	785.9	59.01	1331.8	100.00
Bengkulu	135.6	36.59	235.0	63.41	370.6	100.00
Lampung	366.0	22.03	1295.7	77.97	1661.7	100.00
Bangka Belitung	38.6	40.59	56.5	59.41	95.1	100.00
Kepulauan Riau	76.8	51.75	71.6	48.25	148.4	100.00
DKI Jakarta	405.7	100.00	0.0	0.00	405.7	100.00
Jawa Barat	2654.6	48.64	2803.3	51.36	5457.9	100.00
Jawa Tengah	2687.3	40.98	3869.9	59.02	6557.2	100.00
DI Yogyakarta	335.3	52.93	298.2	47.07	633.5	100.00
Jawa Timur	2575.7	36.00	4579.6	64.00	7155.3	100.00
Banten	399.4	45.07	486.8	54.93	886.2	100.00
Bali	119.8	52.29	109.3	47.71	229.1	100.00
Nusa Tenggara Barat	570.9	51.04	547.7	48.96	1118.6	100.00
Nusa Tenggara Timur	124.9	10.73	1038.7	89.27	1163.6	100.00
Kalimantan Barat	144.1	24.66	440.2	75.34	584.3	100.00
Kalimantan Tengah	51.2	24.35	159.1	75.65	210.3	100.00
Kalimantan selatan	83.1	35.59	150.4	64.41	233.5	100.00
Kalimantan Timur	136.1	41.90	188.7	58.10	324.8	100.00
Sulawesi Utara	79.0	31.59	171.1	68.41	250.1	100.00
Sulawesi Tengah	67.1	12.04	490.3	87.96	557.4	100.00
Sulawesi Selatan	152.8	14.10	930.6	85.90	1083.4	100.00
Sulawesi Tenggara	31.3	6.73	434.1	93.27	465.4	100.00
Gorontalo	30.7	12.69	211.2	87.31	241.9	100.00
Sulawesi Barat	55.1	29.02	134.8	70.98	189.9	100.00
Maluku	49.1	12.13	355.6	87.87	404.7	100.00
Maluku Utara	11.7	10.65	98.2	89.35	109.9	100.00
Papua Barat	11.0	4.12	255.8	95.88	266.8	100.00
Papua	35.4	4.46	758.0	95.54	793.4	100.00
Indonesia	13559.3	36.48	23609.0	63.52	37168.3	100.00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.3.a. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Menurut Provinsi dan Daerah,
Tahun 2005**

Provinsi	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	195882	166608	172084
Sumatera Utara	175152	117578	143095
Sumatera Barat	175730	125602	140962
Riau	196892	151718	167620
Jambi	187608	122185	141157
Sumatera Selatan	172684	120331	138444
Bengkulu	172659	110275	128541
Lampung	164909	113728	125319
Bangka Belitung	197082	178701	186531
Kepulauan Riau	231346	156453	215803
DKI Jakarta	237735	-	237735
Jawa Barat	151235	113964	133701
Jawa Tengah	143776	120115	130013
DI Yogyakarta	160690	130807	148476
Jawa Timur	146743	115272	128598
Banten	183927	108855	150209
Bali	166962	136897	152519
Nusa Tenggara Barat	134488	109403	118891
Nusa Tenggara Timur	141168	89764	98263
Kalimantan Barat	164397	109777	124804
Kalimantan Tengah	161231	125980	136309
Kalimantan selatan	163565	107455	128598
Kalimantan Timur	213378	161910	189851
Sulawesi Utara	150421	118675	130929
Sulawesi Tengah	173991	121193	131524
Sulawesi Selatan	138576	97027	109503
Sulawesi Tenggara	122067	107902	110978
Gorontalo	135837	115018	120670
Maluku	189173	150271	161114
Maluku Utara	174425	122936	137010
Papua	193307	145610	157074
Indonesia	165565	117365	138574

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2005

**Tabel 1.3.b. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Menurut Provinsi dan Daerah,
Tahun 2006**

Provinsi	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	227075	191621	198858
Sumatera Utara	192644	141438	162677
Sumatera Barat	192063	147462	154218
Riau	216880	178225	185063
Jambi	201703	142849	154911
Sumatera Selatan	191595	142103	160607
Bengkulu	192359	131666	160641
Lampung	176783	134326	144934
Bangka Belitung	216585	210620	212094
Kepulauan Riau	260239	184587	228610
DKI Jakarta	250298	-	250298
Jawa Barat	169019	133752	149673
Jawa Tengah	155874	130979	142337
DI Yogyakarta	184638	148523	170720
Jawa Timur	159586	133032	145205
Banten	186665	129687	160688
Bali	174038	142579	161763
Nusa Tenggara Barat	156643	125613	140712
Nusa Tenggara Timur	163374	104221	114982
Kalimantan Barat	165465	127308	134747
Kalimantan Tengah	172522	140089	151905
Kalimantan selatan	177894	129681	147915
Kalimantan Timur	229358	177597	207282
Sulawesi Utara	161434	139349	145285
Sulawesi Tengah	179643	137179	147443
Sulawesi Selatan	145959	109454	120786
Sulawesi Tenggara	134065	122081	124264
Gorontalo	143425	126539	130668
Sulawesi Barat	144060	121380	130480
Maluku	199838	162277	173201
Maluku Utara	184129	137590	150812
Papua Barat	206610	198725	202340
Papua	218826	175481	180201
Indonesia	174290	130584	151997

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2006

Catatan: Garis Kemiskinan Tahun 2006 merupakan Garis Kemiskinan yang direvisi

**Tabel 1.3.c. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Menurut Provinsi dan Daerah,
Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	246375	206724	218143
Sumatera Utara	205379	154827	178132
Sumatera Barat	213942	163301	180669
Riau	233732	194019	214034
Jambi	214769	152019	172349
Sumatera Selatan	205145	161205	178209
Bengkulu	210082	149468	170802
Lampung	187923	145634	157052
Bangka Belitung	236854	234028	235379
Kepulauan Riau	278742	213985	248241
DKI Jakarta	266874	-	266874
Jawa Barat	180821	144204	165734
Jawa Tengah	168186	140803	154111
DI Yogyakarta	200855	156349	184965
Jawa Timur	166546	140322	153145
Banten	188392	140885	169485
Bali	179141	147963	165954
Nusa Tenggara Barat	176591	130867	150026
Nusa Tenggara Timur	185975	113310	126389
Kalimantan Barat	166230	133403	142529
Kalimantan Tengah	179418	153430	162266
Kalimantan selatan	185289	144647	161514
Kalimantan Timur	239560	188787	220368
Sulawesi Utara	165824	149440	156550
Sulawesi Tengah	181555	146682	154006
Sulawesi Selatan	149439	115788	126623
Sulawesi Tenggara	142103	127197	130625
Gorontalo	146458	134410	138181
Sulawesi Barat	144842	130428	135242
Maluku	205046	170547	179552
Maluku Utara	192287	153526	165039
Papua Barat	209518	204958	205998
Papua	242556	190513	202379
Indonesia	187942	146837	166697

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

Tabel 1.4.a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2005

Provinsi	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		K + D	
	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	4.02	1.44	10.29	3.31	5.83	1.85
Sumatera Utara	2.59	0.73	1.90	0.50	2.21	0.60
Sumatera Barat	1.74	0.51	2.00	0.52	1.92	0.52
Riau	1.55	0.36	1.52	0.37	1.53	0.37
Jambi	3.10	0.85	1.28	0.27	1.81	0.44
Sumatera Selatan	4.82	1.55	3.30	0.88	3.83	1.11
Bengkulu	5.57	1.87	3.41	0.84	4.04	1.14
Lampung	4.92	1.64	3.86	1.06	4.10	1.19
Bangka Belitung	1.14	0.22	1.90	0.53	1.57	0.40
Kepulauan Riau	2.06	0.70	1.59	0.30	1.97	0.61
DKI Jakarta	0.78	0.20	-	-	0.78	0.20
Jawa Barat	1.68	0.47	2.31	0.55	1.97	0.51
Jawa Tengah	3.05	0.85	3.84	0.99	3.51	0.93
DI Yogyakarta	2.81	0.83	5.78	1.67	4.03	1.17
Jawa Timur	2.93	0.84	3.97	1.10	3.53	0.99
Banten	1.83	0.61	1.63	0.45	1.74	0.54
Bali	0.81	0.19	1.36	0.32	1.07	0.25
Nusa Tenggara Barat	3.62	0.90	4.96	1.41	4.45	1.21
Nusa Tenggara Timur	1.43	0.28	6.79	2.00	5.91	1.72
Kalimantan Barat	2.87	0.82	2.28	0.58	2.44	0.64
Kalimantan Tengah	1.47	0.38	1.90	0.50	1.77	0.47
Kalimantan selatan	1.54	0.33	0.82	0.20	1.09	0.25
Kalimantan Timur	1.28	0.35	3.83	1.17	2.44	0.73
Sulawesi Utara	2.63	0.81	2.38	0.65	2.48	0.71
Sulawesi Tengah	2.26	0.63	4.64	1.34	4.18	1.20
Sulawesi Selatan	1.77	0.38	2.81	0.70	2.50	0.61
Sulawesi Tenggara	1.10	0.28	5.01	1.47	4.16	1.21
Gorontalo	2.08	0.56	8.17	2.80	6.52	2.19
Maluku	6.04	2.04	5.80	1.39	5.87	1.57
Maluku Utara	1.18	0.17	2.36	0.52	2.04	0.42
Papua	2.72	0.95	12.29	4.35	9.99	3.54
Indonesia	2.30	0.66	3.37	0.92	2.90	0.80

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2005

**Tabel 1.4.b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keperahan
Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006**

Provinsi	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		K + D	
	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	4.32	1.47	10.65	3.40	5.28	1.84
Sumatera Utara	2.46	0.67	2.56	0.71	2.52	0.69
Sumatera Barat	2.00	0.52	2.05	0.57	2.04	0.56
Riau	2.12	0.67	1.08	0.26	1.43	0.40
Jambi	3.70	1.10	1.24	0.30	1.95	0.53
Sumatera Selatan	4.30	1.23	2.99	0.76	3.44	0.92
Bengkulu	4.76	1.55	3.81	0.95	4.06	1.12
Lampung	3.94	1.11	4.82	1.36	4.62	1.30
Bangka Belitung	1.27	0.31	1.75	0.45	1.56	0.39
Kepulauan Riau	1.49	0.43	1.00	0.23	1.39	0.39
DKI Jakarta	0.75	0.19	-	-	0.75	0.19
Jawa Barat	1.74	0.47	2.90	0.78	2.28	0.62
Jawa Tengah	2.75	0.72	4.37	1.10	3.69	0.94
DI Yogyakarta	1.72	0.44	7.13	1.95	4.12	1.11
Jawa Timur	2.71	0.76	4.84	1.33	3.94	1.09
Banten	2.23	0.62	1.81	0.47	2.04	0.55
Bali	0.77	0.17	0.72	0.18	0.74	0.17
Nusa Tenggara Barat	3.39	0.91	4.90	1.35	4.30	1.17
Nusa Tenggara Timur	1.56	0.43	6.55	1.86	5.74	1.63
Kalimantan Barat	3.25	0.99	2.15	0.49	2.47	0.64
Kalimantan Tengah	0.74	0.18	2.07	0.58	1.68	0.46
Kalimantan selatan	1.64	0.45	1.07	0.24	1.28	0.32
Kalimantan Timur	1.62	0.48	4.17	1.24	2.77	0.82
Sulawesi Utara	1.35	0.34	3.82	1.11	2.87	0.82
Sulawesi Tengah	2.52	0.67	7.39	2.30	4.54	1.33
Sulawesi Selatan	1.20	0.30	2.86	0.75	2.33	0.61
Sulawesi Tenggara	1.20	0.34	6.27	1.90	4.07	1.07
Gorontalo	1.71	0.47	9.07	2.92	6.05	1.86
Sulawesi Barat	2.83	0.61	3.78	0.99	3.64	0.93
Maluku	2.09	0.60	9.73	3.42	7.51	2.60
Maluku Utara	0.26	0.06	2.72	0.78	2.01	0.57
Papua Barat	2.94	0.86	10.48	3.44	8.08	2.62
Papua	2.32	0.67	15.24	6.36	12.07	4.97
Indonesia	2.61	0.77	4.22	1.22	3.43	1.00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2006

**Tabel 1.4.c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keperahan
Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		K + D	
	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	3.86	1.23	6.04	1.81	5.41	1.64
Sumatera Utara	2.34	0.61	2.01	0.51	2.17	0.55
Sumatera Barat	1.35	0.30	2.10	0.52	1.84	0.44
Riau	2.02	0.68	2.35	0.67	2.18	0.68
Jambi	3.08	0.98	1.31	0.32	1.88	0.54
Sumatera Selatan	4.92	1.63	3.16	0.83	3.84	1.14
Bengkulu	4.45	1.15	3.81	0.92	4.03	1.00
Lampung	3.23	0.93	4.20	1.12	3.94	1.07
Bangka Belitung	1.25	0.32	2.08	0.60	1.68	0.47
Kepulauan Riau	2.33	0.70	1.42	0.29	1.90	0.50
DKI Jakarta	0.59	0.12	-	-	0.59	0.12
Jawa Barat	1.93	0.50	2.74	0.67	2.26	0.57
Jawa Tengah	3.33	0.96	4.32	1.19	3.84	1.08
DI Yogyakarta	3.08	0.88	5.08	1.55	3.80	1.12
Jawa Timur	2.76	0.79	5.01	1.49	3.91	1.15
Banten	1.09	0.28	1.86	0.44	1.40	0.34
Bali	0.98	0.27	0.87	0.18	0.94	0.23
Nusa Tenggara Barat	6.85	2.24	3.89	1.04	5.13	1.54
Nusa Tenggara Timur	3.89	1.29	5.08	1.35	4.87	1.34
Kalimantan Barat	2.00	0.49	1.70	0.38	1.79	0.41
Kalimantan Tengah	0.98	0.38	2.04	0.57	1.68	0.51
Kalimantan selatan	0.70	0.14	0.89	0.18	0.81	0.16
Kalimantan Timur	1.17	0.28	2.86	0.76	1.81	0.46
Sulawesi Utara	1.30	0.31	2.33	0.60	1.88	0.47
Sulawesi Tengah	2.14	0.56	5.08	1.60	4.46	1.38
Sulawesi Selatan	0.91	0.22	3.40	0.89	2.60	0.68
Sulawesi Tenggara	0.78	0.15	5.39	1.52	4.33	1.21
Gorontalo	1.82	0.44	7.27	2.25	5.57	1.68
Sulawesi Barat	1.73	0.40	3.02	0.66	2.59	0.57
Maluku	2.38	0.58	7.79	2.29	6.38	1.84
Maluku Utara	1.25	0.49	2.64	0.71	2.23	0.64
Papua Barat	0.73	0.12	16.58	7.29	12.97	5.66
Papua	1.25	0.29	13.67	4.94	10.84	3.88
Indonesia	2.15	0.57	3.78	1.09	2.99	0.84

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

Tabel 1.5. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Provinsi	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	541.3	49.95	542.4	50.05	1083.7	100.00
Sumatera Utara	877.8	49.64	890.7	50.36	1768.5	100.00
Sumatera Barat	259.7	49.07	269.5	50.93	529.2	100.00
Riau	291.2	50.69	283.3	49.31	574.5	100.00
Jambi	141.7	50.26	140.2	49.74	281.9	100.00
Sumatera Selatan	675.6	50.73	656.2	49.27	1331.8	100.00
Bengkulu	185.5	50.06	185.1	49.94	370.6	100.00
Lampung	858.8	51.68	802.9	48.32	1661.7	100.00
Bangka Belitung	48.0	50.45	47.1	49.55	95.1	100.00
Kepulauan Riau	74.8	50.43	73.6	49.57	148.4	100.00
DKI Jakarta	201.6	49.68	204.1	50.32	405.7	100.00
Jawa Barat	2775.0	50.84	2682.9	49.16	5457.9	100.00
Jawa Tengah	3280.1	50.02	3277.1	49.98	6557.2	100.00
DI Yogyakarta	308.3	48.66	325.2	51.34	633.5	100.00
Jawa Timur	3504.4	48.98	3650.9	51.02	7155.3	100.00
Banten	460.8	52.00	425.4	48.00	886.2	100.00
Bali	109.8	47.92	119.3	52.08	229.1	100.00
Nusa Tenggara Barat	523.6	46.81	595.0	53.19	1118.6	100.00
Nusa Tenggara Timur	586.7	50.42	576.9	49.58	1163.6	100.00
Kalimantan Barat	294.3	50.37	290.0	49.63	584.3	100.00
Kalimantan Tengah	109.5	52.05	100.8	47.95	210.3	100.00
Kalimantan selatan	113.7	48.69	119.8	51.31	233.5	100.00
Kalimantan Timur	171.7	52.87	153.1	47.13	324.8	100.00
Sulawesi Utara	128.4	51.32	121.7	48.68	250.1	100.00
Sulawesi Tengah	282.2	50.62	275.2	49.38	557.4	100.00
Sulawesi Selatan	529.2	48.85	554.2	51.15	1083.4	100.00
Sulawesi Tenggara	233.7	50.23	231.7	49.77	465.4	100.00
Gorontalo	120.9	49.99	121.0	50.01	241.9	100.00
Sulawesi Barat	94.9	49.99	95.0	50.01	189.9	100.00
Maluku	206.2	50.96	198.5	49.04	404.7	100.00
Maluku Utara	58.6	53.36	51.3	46.64	109.9	100.00
Papua Barat	134.2	50.30	132.6	49.70	266.8	100.00
Papua	416.7	52.52	376.7	47.48	793.4	100.00
Indonesia	18598.8	50.04	18569.5	49.96	37168.3	100.00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.6. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut
Provinsi dan Jenis Kelamin Kepala Rumah tangga Tahun 2007**

Provinsi	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nangroe Aceh Darussalam	928.8	85.71	154.9	14.29	1083.7	100.00
Sumatera Utara	1602.7	90.63	165.8	9.37	1768.5	100.00
Sumatera Barat	462.5	87.40	66.7	12.60	529.2	100.00
Riau	530.0	92.25	44.5	7.75	574.5	100.00
Jambi	256.9	91.15	25.0	8.85	281.9	100.00
Sumatera Selatan	1243.1	93.34	88.7	6.66	1331.8	100.00
Bengkulu	345.7	93.29	24.9	6.71	370.6	100.00
Lampung	1565.5	94.21	96.2	5.79	1661.7	100.00
Bangka Belitung	83.4	87.74	11.7	12.26	95.1	100.00
Kepulauan Riau	136.5	91.97	11.9	8.03	148.4	100.00
DKI Jakarta	363.1	89.50	42.6	10.50	405.7	100.00
Jawa Barat	4994.3	91.51	463.6	8.49	5457.9	100.00
Jawa Tengah	6023.8	91.86	533.4	8.14	6557.2	100.00
DI Yogyakarta	559.2	88.27	74.3	11.73	633.5	100.00
Jawa Timur	6317.2	88.29	838.1	11.71	7155.3	100.00
Banten	790.9	89.25	95.3	10.75	886.2	100.00
Bali	221.2	96.56	7.9	3.44	229.1	100.00
Nusa Tenggara Barat	929.5	83.09	189.1	16.91	1118.6	100.00
Nusa Tenggara Timur	1068.5	91.83	95.1	8.17	1163.6	100.00
Kalimantan Barat	541.1	92.61	43.2	7.39	584.3	100.00
Kalimantan Tengah	193.4	91.94	16.9	8.06	210.3	100.00
Kalimantan selatan	203.2	87.03	30.3	12.97	233.5	100.00
Kalimantan Timur	301.7	92.89	23.1	7.11	324.8	100.00
Sulawesi Utara	235.0	93.95	15.1	6.05	250.1	100.00
Sulawesi Tengah	527.7	94.68	29.7	5.32	557.4	100.00
Sulawesi Selatan	940.1	86.77	143.3	13.23	1083.4	100.00
Sulawesi Tenggara	419.3	90.09	46.1	9.91	465.4	100.00
Gorontalo	231.0	95.48	10.9	4.52	241.9	100.00
Sulawesi Barat	174.2	91.71	15.7	8.29	189.9	100.00
Maluku	382.7	94.57	22.0	5.43	404.7	100.00
Maluku Utara	105.9	96.37	4.0	3.63	109.9	100.00
Papua Barat	250.5	93.90	16.3	6.10	266.8	100.00
Papua	752.4	94.83	41.0	5.17	793.4	100.00
Indonesia	33672.3	90.59	3496.0	9.41	37168.3	100.00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Pendidikan
Kepala Rumahtangga Tahun 2007**

Provinsi	Tidak/belum belum tamat SD		SD		SLTP		SLTA		Diatas SLTA		Total	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nangroe Aceh Darussalam	344,3	31,77	408,3	37,68	195,9	18,08	126,5	11,67	8,7	0,80	1083,7	100,00
Sumatera Utara	516,5	29,20	572,3	32,36	378,0	21,37	288,9	16,34	12,8	0,73	1768,5	100,00
Sumatera Barat	241,9	45,72	162,6	30,73	73,8	13,94	48,2	9,11	2,6	0,49	529,2	100,00
Riau	208,0	36,21	211,2	36,76	93,0	16,18	56,5	9,83	5,8	1,01	574,5	100,00
Jambi	116,0	41,14	111,7	39,63	33,4	11,85	19,3	6,83	1,5	0,55	281,9	100,00
Sumatera Selatan	441,5	33,15	596,5	44,79	159,1	11,95	133,2	10,01	1,4	0,11	1331,8	100,00
Bengkulu	129,8	35,02	134,7	36,34	58,3	15,74	47,3	12,76	0,5	0,15	370,6	100,00
Lampung	737,8	44,40	557,2	33,53	233,5	14,05	131,3	7,90	1,8	0,11	1661,7	100,00
Bangka Belitung	46,5	48,92	33,9	35,65	8,3	8,73	6,2	6,54	0,2	0,17	95,1	100,00
Kepulauan Riau	60,9	41,06	38,2	25,77	23,8	16,04	24,2	16,34	1,2	0,80	148,4	100,00
DKI Jakarta	79,4	19,58	131,8	32,49	116,8	28,78	75,3	18,57	2,4	0,58	405,7	100,00
Jawa Barat	2154,3	39,47	2628,0	48,15	466,6	8,55	194,9	3,57	14,1	0,26	5457,9	100,00
Jawa Tengah	2777,8	42,36	2875,6	43,85	545,6	8,32	334,8	5,11	23,5	0,36	6557,2	100,00
DI Yogyakarta	223,0	35,20	234,9	37,08	107,7	17,00	66,6	10,51	1,4	0,22	633,5	100,00
Jawa Timur	3335,1	46,61	2690,5	37,60	675,4	9,44	419,1	5,86	35,2	0,49	7155,3	100,00
Banten	443,1	50,00	320,3	36,15	88,0	9,92	34,9	3,93	0,0	0,00	886,2	100,00
Bali	85,5	37,34	87,3	38,10	24,6	10,76	29,7	12,96	1,9	0,85	229,1	100,00
Nusa Tenggara Barat	657,4	58,77	280,7	25,09	109,0	9,75	62,7	5,61	8,8	0,78	1118,6	100,00
Nusa Tenggara Timur	562,5	48,34	425,7	36,58	90,4	7,77	80,9	6,95	4,2	0,36	1163,6	100,00
Kalimantan Barat	297,0	50,83	178,2	30,50	58,5	10,02	48,4	8,28	2,2	0,38	584,3	100,00
Kalimantan Tengah	50,4	23,97	110,5	52,55	36,3	17,24	12,4	5,90	0,7	0,33	210,3	100,00
Kalimantan selatan	109,2	46,75	76,4	32,73	30,5	13,06	17,1	7,33	0,3	0,13	233,5	100,00
Kalimantan Timur	122,4	37,70	114,7	35,33	47,8	14,71	37,6	11,57	2,3	0,70	324,8	100,00
Sulawesi Utara	71,9	28,74	82,5	33,00	58,4	23,34	36,9	14,75	0,4	0,17	250,1	100,00
Sulawesi Tengah	185,4	33,27	226,9	40,71	82,9	14,87	57,9	10,39	4,3	0,77	557,4	100,00
Sulawesi Selatan	571,7	52,77	281,2	25,95	126,3	11,66	93,1	8,59	11,1	1,03	1083,4	100,00
Sulawesi Tenggara	164,9	35,43	154,3	33,14	82,0	17,62	59,3	12,74	4,9	1,06	465,4	100,00
Gorontalo	139,3	57,57	80,1	33,11	12,4	5,13	9,4	3,89	0,7	0,29	241,9	100,00
Sulawesi Barat	85,5	45,05	68,8	36,23	20,1	10,58	14,1	7,44	1,3	0,70	189,9	100,00
Maluku	82,1	20,29	184,7	45,65	68,3	16,88	62,5	15,44	7,1	1,75	404,7	100,00
Maluku Utara	36,8	33,50	42,3	38,49	18,5	16,82	11,4	10,39	0,9	0,80	109,9	100,00
Papua Barat	75,2	28,17	98,3	36,85	40,7	15,24	48,3	18,10	4,4	1,64	266,8	100,00
Papua	369,0	46,50	211,2	26,62	97,2	12,25	101,9	12,85	14,2	1,79	793,4	100,00
Indonesia	15514,3	41,74	14428,5	38,82	4256,8	11,45	2786,9	7,50	181,8	0,49	37168,3	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

Tabel 1.8. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Kepala Rumahtangga Tahun 2007

Provinsi	Tidak Bekerja		Pertanian		Industri		lainnya		Total	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nangroe Aceh Darussalam	66,1	6,10	745,0	68,75	26,8	2,48	245,7	22,67	1083,7	100,00
Sumatera Utara	140,7	7,95	1146,0	64,80	49,6	2,81	432,2	24,44	1768,5	100,00
Sumatera Barat	47,7	9,01	335,8	63,45	15,6	2,95	130,1	24,59	529,2	100,00
Riau	49,9	8,68	389,1	67,74	14,9	2,59	120,6	20,99	574,5	100,00
Jambi	17,6	6,24	196,4	69,67	13,0	4,61	54,9	19,48	281,9	100,00
Sumatera Selatan	61,5	4,62	965,5	72,49	30,0	2,25	274,9	20,64	1331,8	100,00
Bengkulu	10,9	2,95	310,6	83,80	7,0	1,88	42,1	11,37	370,6	100,00
Lampung	95,4	5,74	1183,8	71,24	67,6	4,07	314,8	18,95	1661,7	100,00
Bangka Belitung	7,4	7,80	55,0	57,84	1,5	1,62	31,1	32,75	95,1	100,00
Kepulauan Riau	15,6	10,48	71,5	48,18	11,3	7,64	50,0	33,69	148,4	100,00
DKI Jakarta	70,9	17,48	4,5	1,10	35,7	8,80	294,6	72,62	405,7	100,00
Jawa Barat	487,2	8,93	2341,9	42,91	410,5	7,52	2218,3	40,64	5457,9	100,00
Jawa Tengah	585,3	8,93	3550,5	54,15	520,5	7,94	1900,9	28,99	6557,2	100,00
DI Yogyakarta	67,8	10,71	296,7	46,83	53,4	8,43	215,6	34,03	633,5	100,00
Jawa Timur	716,8	10,02	4197,5	58,66	383,6	5,36	1857,3	25,96	7155,3	100,00
Banten	90,2	10,17	410,3	46,30	33,8	3,81	351,9	39,71	886,2	100,00
Bali	9,8	4,28	123,9	54,07	29,9	13,04	65,5	28,61	229,1	100,00
Nusa Tenggara Barat	126,7	11,32	576,9	51,57	88,6	7,92	326,5	29,19	1118,6	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,4	3,73	972,7	83,59	23,8	2,05	123,8	10,64	1163,6	100,00
Kalimantan Barat	39,9	6,83	436,3	74,67	11,9	2,04	96,2	16,46	584,3	100,00
Kalimantan Tengah	5,3	2,52	154,2	73,31	2,2	1,05	48,6	23,11	210,3	100,00
Kalimantan selatan	19,6	8,39	151,9	65,05	11,8	5,05	50,2	21,51	233,5	100,00
Kalimantan Timur	25,5	7,86	203,9	62,77	11,2	3,45	84,2	25,92	324,8	100,00
Sulawesi Utara	13,3	5,31	166,2	66,45	6,6	2,65	64,0	25,59	250,1	100,00
Sulawesi Tengah	16,2	2,91	436,6	78,33	22,2	3,98	82,3	14,77	557,4	100,00
Sulawesi Selatan	119,3	11,01	685,8	63,30	47,7	4,40	230,6	21,28	1083,4	100,00
Sulawesi Tenggara	20,9	4,50	337,1	72,43	18,5	3,97	88,9	19,11	465,4	100,00
Gorontalo	7,1	2,92	170,7	70,58	12,8	5,30	51,3	21,20	241,9	100,00
Sulawesi Barat	11,6	6,11	154,2	81,19	3,3	1,76	20,8	10,93	189,9	100,00
Maluku	9,9	2,45	328,1	81,07	15,7	3,87	51,0	12,61	404,7	100,00
Maluku Utara	4,8	4,37	84,9	77,21	4,5	4,10	15,7	14,32	109,9	100,00
Papua Barat	9,5	3,55	183,6	68,81	3,5	1,33	70,2	26,31	266,8	100,00
Papua	24,8	3,13	656,8	82,78	6,1	0,76	105,7	13,33	793,4	100,00
Indonesia	3046,7	8,20	21994,7	59,18	1999,1	5,38	10127,8	27,25	37168,3	100,00

Catatan: kolom (2) dan (3) tidak termasuk yang tidak bekerja dengan alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.9. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan
Kepala Rumah tangga Tahun 2007**

Provinsi	Tidak Bekerja		Berusaha Sendiri		Berusaha dibantu		Karyawan/Buruh		Pekerja Keluarga		Total	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nangroe Aceh Darussalam	66,1	6,10	784,5	72,39	38,5	3,56	185,7	17,13	8,9	0,82	1083,7	100,00
Sumatera Utara	140,7	7,95	1088,6	61,55	33,9	1,92	473,7	26,79	31,6	1,79	1768,5	100,00
Sumatera Barat	47,7	9,01	308,5	58,30	8,1	1,54	149,7	28,29	15,1	2,86	529,2	100,00
Riau	49,9	8,68	310,9	54,12	18,4	3,21	193,3	33,65	1,9	0,34	574,5	100,00
Jambi	17,6	6,24	176,0	62,44	4,1	1,47	80,5	28,55	3,7	1,30	281,9	100,00
Sumatera Selatan	61,5	4,62	950,6	71,38	25,2	1,89	279,1	20,95	15,5	1,16	1331,8	100,00
Bengkulu	10,9	2,95	307,3	82,93	2,5	0,66	43,3	11,69	6,6	1,77	370,6	100,00
Lampung	95,4	5,74	1087,0	65,42	26,7	1,61	432,0	26,00	20,6	1,24	1661,7	100,00
Bangka Belitung	7,4	7,80	56,7	59,58	2,3	2,39	26,9	28,28	1,9	1,96	95,1	100,00
Kepulauan Riau	15,6	10,48	80,5	54,25	1,6	1,06	50,2	33,84	0,5	0,37	148,4	100,00
DKI Jakarta	70,9	17,48	159,1	39,22	6,4	1,59	169,2	41,71	0,0	0,00	405,7	100,00
Jawa Barat	487,2	8,93	2544,2	46,62	83,3	1,53	2298,4	42,11	44,8	0,82	5457,9	100,00
Jawa Tengah	585,3	8,93	3592,4	54,79	137,8	2,10	2169,1	33,08	72,6	1,11	6557,2	100,00
DI Yogyakarta	67,8	10,71	373,6	58,97	5,2	0,82	184,5	29,13	2,3	0,37	633,5	100,00
Jawa Timur	716,8	10,02	3999,1	55,89	200,4	2,80	2143,6	29,96	95,3	1,33	7155,3	100,00
Banten	90,2	10,17	496,9	56,07	24,1	2,72	263,9	29,78	11,2	1,26	886,2	100,00
Bali	9,8	4,28	140,4	61,30	1,4	0,62	72,5	31,66	4,9	2,15	229,1	100,00
Nusa Tenggara Barat	126,7	11,32	603,8	53,98	31,4	2,80	342,9	30,66	13,9	1,24	1118,6	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,4	3,73	972,7	83,60	23,6	2,03	82,5	7,09	41,4	3,56	1163,6	100,00
Kalimantan Barat	39,9	6,83	435,5	74,54	10,4	1,78	91,9	15,73	6,6	1,14	584,3	100,00
Kalimantan Tengah	5,3	2,52	161,5	76,78	5,5	2,62	36,3	17,26	1,7	0,82	210,3	100,00
Kalimantan selatan	19,6	8,39	168,9	72,32	2,8	1,22	38,9	16,66	3,3	1,42	233,5	100,00
Kalimantan Timur	25,5	7,86	215,7	66,40	3,9	1,20	77,8	23,96	1,9	0,58	324,8	100,00
Sulawesi Utara	13,3	5,31	139,1	55,62	8,4	3,35	86,4	34,54	3,0	1,18	250,1	100,00
Sulawesi Tengah	16,2	2,91	415,9	74,61	14,1	2,53	103,5	18,58	7,6	1,37	557,4	100,00
Sulawesi Selatan	119,3	11,01	785,8	72,53	23,7	2,19	147,8	13,64	6,8	0,63	1083,4	100,00
Sulawesi Tenggara	20,9	4,50	360,0	77,35	15,6	3,35	64,7	13,90	4,2	0,91	465,4	100,00
Gorontalo	7,1	2,92	155,8	64,41	14,0	5,80	64,1	26,50	0,9	0,36	241,9	100,00
Sulawesi Barat	11,6	6,11	155,4	81,85	5,7	3,02	14,9	7,84	2,2	1,18	189,9	100,00
Maluku	9,9	2,45	335,3	82,84	4,9	1,22	34,9	8,62	19,7	4,87	404,7	100,00
Maluku Utara	4,8	4,37	84,2	76,61	3,2	2,88	15,9	14,44	1,9	1,70	109,9	100,00
Papua Barat	9,5	3,55	202,6	75,92	2,7	1,02	50,4	18,90	1,6	0,60	266,8	100,00
Papua	24,8	3,13	623,1	78,53	11,1	1,40	81,1	10,22	53,3	6,72	793,4	100,00
Indonesia	3046,7	8,20	22246,0	59,85	802,9	2,16	10568,7	28,43	504,1	1,36	37168,3	100,00

Catatan: kolom (2) & (3) tidak termasuk yang tidak bekerja dengan alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja
Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

Tabel 2.1.a. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007

Miskin				
Provinsi	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15 - 24 th	15 - 55 th	7 -12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	98.77	95.12	98.07	86.88
Sumatera Utara	98.04	94.86	94.68	79.75
Sumatera Barat	97.71	93.13	92.61	69.02
Riau	98.20	93.58	93.81	75.49
Jambi	96.73	88.49	92.87	67.20
Sumatera Selatan	98.33	95.00	95.38	67.40
Bengkulu	97.98	93.34	96.01	72.19
Lampung	98.99	92.65	95.53	76.81
Bangka Belitung	93.15	89.18	90.52	44.13
Kepulauan Riau	98.09	94.06	95.79	76.11
DKI Jakarta	99.64	97.90	92.94	66.90
Jawa Barat	98.39	92.29	93.54	59.67
Jawa Tengah	98.77	89.45	95.83	65.38
DI Yogyakarta	99.26	92.08	98.41	85.63
Jawa Timur	97.75	85.86	95.51	71.74
Banten	97.22	89.00	91.20	42.27
Bali	96.57	82.63	92.84	63.59
Nusa Tenggara Barat	93.72	77.98	93.95	75.03
Nusa Tenggara Timur	93.76	85.87	90.09	67.47
Kalimantan Barat	95.86	86.06	90.03	66.27
Kalimantan Tengah	98.04	94.39	94.65	71.72
Kalimantan selatan	97.74	90.07	89.65	59.17
Kalimantan Timur	98.15	92.61	96.14	80.61
Sulawesi Utara	98.75	97.26	94.27	65.76
Sulawesi Tengah	96.74	90.32	91.32	58.87
Sulawesi Selatan	89.77	78.53	87.46	55.94
Sulawesi Tenggara	95.89	89.19	93.40	72.53
Gorontalo	94.58	89.63	86.02	57.97
Sulawesi Barat	93.44	82.21	84.93	58.89
Maluku	98.12	96.40	96.27	86.52
Maluku Utara	98.13	93.36	93.68	77.42
Papua Barat	91.06	85.76	89.56	80.23
Papua	84.22	65.30	78.40	70.21
Indonesia	97.28	89.10	93.72	68.13

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

Tabel 2.1.b. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007

Tidak Miskin				
Provinsi	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15 - 24 th	15 - 55 th	7 -12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	99.08	97.19	99.38	97.15
Sumatera Utara	99.31	98.37	99.18	92.78
Sumatera Barat	99.35	98.03	98.82	91.43
Riau	99.48	98.44	98.66	93.70
Jambi	99.37	97.31	98.03	86.77
Sumatera Selatan	99.52	98.57	98.09	88.41
Bengkulu	99.18	97.28	98.88	91.12
Lampung	99.62	97.00	98.76	87.33
Bangka Belitung	98.68	97.13	97.16	85.09
Kepulauan Riau	99.10	97.61	98.27	93.51
DKI Jakarta	99.79	99.29	99.17	92.13
Jawa Barat	99.62	97.96	98.72	83.89
Jawa Tengah	99.45	95.54	99.62	88.75
DI Yogyakarta	99.83	97.15	99.58	94.11
Jawa Timur	99.23	94.85	99.26	90.09
Banten	99.58	97.58	98.38	86.06
Bali	98.57	93.43	98.88	89.12
Nusa Tenggara Barat	97.89	88.34	98.32	88.66
Nusa Tenggara Timur	96.68	93.27	95.52	81.33
Kalimantan Barat	98.31	93.50	98.11	86.76
Kalimantan Tengah	99.48	98.05	98.73	88.15
Kalimantan selatan	99.12	96.68	98.05	80.45
Kalimantan Timur	99.39	97.65	98.32	92.12
Sulawesi Utara	99.41	99.42	98.17	91.09
Sulawesi Tengah	98.99	97.82	98.97	87.89
Sulawesi Selatan	97.50	92.66	97.11	82.63
Sulawesi Tenggara	98.12	94.74	98.72	89.32
Gorontalo	98.25	98.28	97.21	85.18
Sulawesi Barat	96.41	91.51	97.27	78.77
Maluku	99.27	98.17	97.89	93.25
Maluku Utara	98.89	97.06	97.28	90.93
Papua Barat	93.32	94.25	96.67	95.55
Papua	87.36	80.73	88.13	84.40
Indonesia	99.13	96.42	98.66	88.07

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

Tabel 2.1.c. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007

Miskin + Tidak Miskin				
Provinsi	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15 - 24 th	15 - 55 th	7 -12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	99.00	96.68	98.93	93.90
Sumatera Utara	99.15	97.96	98.31	90.72
Sumatera Barat	99.18	97.53	97.78	88.35
Riau	99.34	97.96	97.92	91.11
Jambi	99.11	96.51	97.28	84.30
Sumatera Selatan	99.30	97.94	97.43	83.85
Bengkulu	98.93	96.50	98.11	86.49
Lampung	99.49	96.12	97.90	84.70
Bangka Belitung	98.10	96.46	96.30	79.11
Kepulauan Riau	99.00	97.30	97.88	90.83
DKI Jakarta	99.78	99.23	98.73	90.36
Jawa Barat	99.44	97.27	97.82	79.91
Jawa Tengah	99.31	94.41	98.65	83.54
DI Yogyakarta	99.75	96.31	99.29	92.15
Jawa Timur	98.94	93.24	98.35	86.11
Banten	99.35	96.92	97.45	80.30
Bali	98.47	92.83	98.29	87.44
Nusa Tenggara Barat	96.92	86.06	96.96	84.82
Nusa Tenggara Timur	95.99	91.48	93.67	77.32
Kalimantan Barat	98.01	92.65	96.71	83.74
Kalimantan Tengah	99.34	97.74	98.23	86.14
Kalimantan selatan	99.03	96.28	97.21	78.50
Kalimantan Timur	99.25	97.16	97.99	90.47
Sulawesi Utara	99.34	99.21	97.55	87.79
Sulawesi Tengah	98.53	96.33	96.82	80.59
Sulawesi Selatan	96.54	90.95	95.26	78.42
Sulawesi Tenggara	97.69	93.71	97.31	85.22
Gorontalo	97.25	96.14	93.62	76.47
Sulawesi Barat	95.90	90.02	94.13	74.56
Maluku	98.95	97.68	97.24	91.03
Maluku Utara	98.81	96.69	96.71	88.94
Papua Barat	92.44	91.19	93.17	88.24
Papua	86.21	75.20	83.34	77.84
Indonesia	98.84	95.34	97.60	84.26

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 2.2. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 7-12
Menurut Provinsi Tahun 2007**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	0,80	0,23	0,42
Sumatera Utara	1,67	0,36	0,61
Sumatera Barat	2,82	0,32	0,72
Riau	2,10	0,42	0,67
Jambi	2,11	0,66	0,86
Sumatera Selatan	2,56	0,86	1,27
Bengkulu	1,29	0,44	0,66
Lampung	1,27	0,40	0,63
Bangka Belitung	5,19	1,30	1,79
Kepulauan Riau	0,62	0,67	0,66
DKI Jakarta	2,73	0,41	0,57
Jawa Barat	1,96	0,31	0,59
Jawa Tengah	1,07	0,14	0,37
DI Yogyakarta	0,00	0,26	0,19
Jawa Timur	0,96	0,18	0,36
Banten	2,64	0,13	0,44
Bali	0,95	0,36	0,41
Nusa Tenggara Barat	1,60	0,56	0,88
Nusa Tenggara Timur	2,23	1,13	1,49
Kalimantan Barat	2,42	0,50	0,81
Kalimantan Tengah	2,49	0,58	0,81
Kalimantan selatan	4,48	0,87	1,21
Kalimantan Timur	2,50	0,34	0,67
Sulawesi Utara	2,18	1,13	1,29
Sulawesi Tengah	2,09	0,45	0,89
Sulawesi Selatan	5,02	0,86	1,62
Sulawesi Tenggara	2,53	0,56	1,06
Gorontalo	6,28	0,92	2,56
Sulawesi Barat	7,20	0,40	2,05
Maluku	1,45	0,55	0,90
Maluku Utara	2,76	0,63	0,96
Papua Barat	2,18	1,12	1,62
Papua	1,09	0,85	0,97
Indonesia	1,78	0,38	0,67

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 2.3. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 13-15
Menurut Provinsi Tahun 2007**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	4,17	0,72	1,76
Sumatera Utara	9,63	2,41	3,48
Sumatera Barat	19,85	4,77	6,66
Riau	8,13	1,87	2,66
Jambi	12,47	4,81	5,63
Sumatera Selatan	15,81	4,01	6,30
Bengkulu	13,81	3,30	5,65
Lampung	6,56	3,42	4,15
Bangka Belitung	43,04	7,90	12,30
Kepulauan Riau	10,51	1,49	2,75
DKI Jakarta	20,10	1,77	2,93
Jawa Barat	13,88	2,49	4,05
Jawa Tengah	6,41	1,37	2,28
DI Yogyakarta	3,45	0,25	0,95
Jawa Timur	7,13	1,87	2,86
Banten	21,62	2,21	3,86
Bali	9,28	1,60	2,00
Nusa Tenggara Barat	10,40	3,87	5,59
Nusa Tenggara Timur	19,06	8,86	11,66
Kalimantan Barat	18,17	6,04	7,63
Kalimantan Tengah	8,46	3,80	4,30
Kalimantan selatan	23,10	5,71	7,16
Kalimantan Timur	8,12	3,23	3,88
Sulawesi Utara	23,94	4,55	6,86
Sulawesi Tengah	19,78	3,50	6,98
Sulawesi Selatan	22,59	5,13	7,48
Sulawesi Tenggara	11,61	3,36	5,20
Gorontalo	30,05	8,81	15,07
Sulawesi Barat	23,00	8,81	11,53
Maluku	5,19	1,88	2,94
Maluku Utara	11,99	4,82	5,80
Papua Barat	8,86	0,68	4,40
Papua	8,88	3,58	5,86
Indonesia	11,22	2,81	4,21

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 3.1. Persentase Pekerja Informal Menurut Provinsi
Tahun 2007**

Provinsi	2007
(1)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	67,42
Sumatera Utara	59,87
Sumatera Barat	62,45
Riau	53,49
Jambi	66,02
Sumatera Selatan	70,85
Bengkulu	74,24
Lampung	69,85
Bangka Belitung	53,12
Kepulauan Riau	34,53
DKI Jakarta	32,78
Jawa Barat	51,43
Jawa Tengah	61,55
DI Yogyakarta	58,59
Jawa Timur	60,30
Banten	46,73
Bali	60,10
Nusa Tenggara Barat	72,23
Nusa Tenggara Timur	84,08
Kalimantan Barat	71,47
Kalimantan Tengah	69,47
Kalimantan selatan	68,45
Kalimantan Timur	50,01
Sulawesi Utara	58,23
Sulawesi Tengah	72,62
Sulawesi Selatan	70,83
Sulawesi Tenggara	74,94
Gorontalo	60,92
Sulawesi Barat	81,14
Maluku	76,63
Maluku Utara	77,49
Papua Barat	71,92
Papua	79,94
Indonesia	60,06

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 4.1.a. Persentase Balita Yang Diimunisasi Menurut Provinsi
Tahun 2007**

Miskin					
Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	73,73	70,14	80,30	63,60	59,79
Sumatera Utara	70,44	66,87	76,59	55,81	54,51
Sumatera Barat	78,29	75,59	80,20	66,41	66,48
Riau	80,65	80,27	85,09	68,03	65,54
Jambi	81,90	80,79	81,76	67,56	70,75
Sumatera Selatan	86,07	84,52	87,16	74,96	74,90
Bengkulu	90,30	87,31	87,91	77,24	81,42
Lampung	90,79	87,80	88,93	75,84	83,00
Bangka Belitung	83,45	81,82	84,14	75,11	76,92
Kepulauan Riau	88,89	85,13	86,34	72,58	78,67
DKI Jakarta	91,81	90,22	88,12	75,67	78,05
Jawa Barat	87,78	83,51	91,79	74,20	75,54
Jawa Tengah	95,94	94,08	95,07	81,88	87,94
DI Yogyakarta	100,88	96,24	98,97	85,65	95,97
Jawa Timur	87,97	83,53	88,29	72,93	77,99
Banten	73,12	72,03	84,18	68,69	54,31
Bali	96,34	93,90	94,98	78,98	91,18
Nusa Tenggara Barat	93,96	89,97	90,38	79,59	82,52
Nusa Tenggara Timur	90,06	87,93	87,86	79,77	83,37
Kalimantan Barat	76,29	72,72	76,03	64,40	63,47
Kalimantan Tengah	69,28	69,94	73,04	62,52	64,39
Kalimantan selatan	78,30	75,61	79,11	63,85	66,10
Kalimantan Timur	89,52	85,93	86,72	75,43	80,49
Sulawesi Utara	94,52	89,19	89,92	73,86	83,10
Sulawesi Tengah	78,55	75,24	80,31	64,18	69,04
Sulawesi Selatan	79,37	76,32	79,37	65,88	70,58
Sulawesi Tenggara	84,66	82,58	83,48	72,85	78,55
Gorontalo	84,24	81,37	84,63	72,77	77,61
Sulawesi Barat	67,09	62,78	68,27	56,87	58,08
Maluku	74,05	71,59	76,78	65,13	67,55
Maluku Utara	69,50	63,12	72,21	63,28	56,98
Papua Barat	84,06	80,78	82,33	57,48	55,71
Papua	73,73	72,93	75,14	62,18	58,23
Indonesia	86,06	82,94	87,13	72,56	75,36

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 4.1.b. Persentase Balita Yang Diimunisasi Menurut Provinsi
Tahun 2007**

Tidak Miskin					
Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	78,05	75,92	86,10	69,88	69,64
Sumatera Utara	82,96	80,54	87,21	68,22	69,13
Sumatera Barat	89,25	85,42	88,00	72,43	79,86
Riau	89,45	86,25	89,84	75,36	80,34
Jambi	91,37	88,87	90,06	78,53	83,63
Sumatera Selatan	92,50	88,31	91,58	78,84	82,57
Bengkulu	95,46	94,70	94,47	82,15	91,48
Lampung	93,75	90,20	92,28	80,01	88,04
Bangka Belitung	91,11	88,59	91,49	79,91	85,68
Kepulauan Riau	95,63	92,46	94,14	83,64	88,43
DKI Jakarta	98,25	96,21	96,50	84,63	92,99
Jawa Barat	93,37	89,58	94,34	79,33	84,38
Jawa Tengah	97,68	94,97	96,07	82,76	91,65
DI Yogyakarta	100,30	97,46	97,90	82,30	97,11
Jawa Timur	94,46	91,87	93,99	81,99	86,85
Banten	86,12	83,25	91,46	72,45	69,00
Bali	97,68	95,23	95,57	82,02	93,98
Nusa Tenggara Barat	97,00	94,18	93,88	84,37	89,05
Nusa Tenggara Timur	93,42	91,15	91,70	81,08	86,72
Kalimantan Barat	83,27	80,27	82,37	67,43	73,84
Kalimantan Tengah	84,82	83,10	85,16	73,78	77,63
Kalimantan selatan	90,03	86,30	86,86	72,76	76,89
Kalimantan Timur	94,74	92,43	93,47	81,39	87,24
Sulawesi Utara	97,17	94,15	93,57	80,64	89,71
Sulawesi Tengah	88,71	85,95	89,82	75,84	82,29
Sulawesi Selatan	90,13	86,88	88,98	75,97	82,81
Sulawesi Tenggara	89,67	87,66	88,92	79,12	86,23
Gorontalo	95,14	91,55	93,05	84,92	86,68
Sulawesi Barat	79,54	77,34	83,25	72,20	73,69
Maluku	84,31	83,06	86,74	75,81	79,15
Maluku Utara	79,58	76,80	82,91	71,91	71,38
Papua Barat	90,28	87,93	89,74	73,85	75,02
Papua	87,43	85,37	86,90	74,12	77,52
Indonesia	92,13	89,19	92,25	78,38	83,65

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 4.1.c. Persentase Balita Yang Diimunisasi Menurut Provinsi
Tahun 2007**

Miskin + Tidak Miskin					
Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	76,70	74,12	84,29	67,92	66,57
Sumatera Utara	80,49	77,84	85,11	65,76	66,24
Sumatera Barat	87,40	83,76	86,69	71,42	77,60
Riau	88,31	85,48	89,23	74,41	78,43
Jambi	90,23	87,89	89,06	77,20	82,08
Sumatera Selatan	90,97	87,41	90,53	77,92	80,75
Bengkulu	94,04	92,67	92,67	80,80	88,71
Lampung	92,92	89,53	91,35	78,84	86,63
Bangka Belitung	90,26	87,85	90,68	79,38	84,71
Kepulauan Riau	94,84	91,60	93,22	82,34	87,28
DKI Jakarta	97,81	95,81	95,93	84,03	91,98
Jawa Barat	92,41	88,54	93,90	78,45	82,86
Jawa Tengah	97,24	94,74	95,82	82,53	90,70
DI Yogyakarta	100,43	97,19	98,14	83,05	96,86
Jawa Timur	92,82	89,76	92,55	79,70	84,61
Banten	84,80	82,12	90,73	72,07	67,51
Bali	97,53	95,09	95,51	81,69	93,68
Nusa Tenggara Barat	96,00	92,80	92,73	82,81	86,92
Nusa Tenggara Timur	92,24	90,01	90,34	80,62	85,54
Kalimantan Barat	82,08	78,98	81,28	66,91	72,06
Kalimantan Tengah	82,87	81,45	83,64	72,37	75,96
Kalimantan selatan	88,88	85,25	86,09	71,88	75,83
Kalimantan Timur	94,06	91,58	92,58	80,61	86,36
Sulawesi Utara	96,67	93,21	92,88	79,36	88,45
Sulawesi Tengah	85,73	82,81	87,03	72,42	78,40
Sulawesi Selatan	87,92	84,72	87,01	73,90	80,31
Sulawesi Tenggara	88,26	86,23	87,40	77,36	84,08
Gorontalo	91,29	87,95	90,07	80,63	83,48
Sulawesi Barat	76,43	73,70	79,51	68,37	69,79
Maluku	80,44	78,73	82,98	71,78	74,77
Maluku Utara	78,12	74,83	81,36	70,66	69,30
Papua Barat	87,49	84,72	86,42	66,52	66,37
Papua	81,52	80,01	81,84	68,97	69,21
Indonesia	90,85	87,87	91,17	77,15	81,90

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 4.2.a. Persentase Penolong Persalinan Pertama
Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2007**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	66,30	81,71	76,90
Sumatera Utara	69,45	85,06	81,98
Sumatera Barat	69,60	85,79	83,07
Riau	45,55	71,79	68,39
Jambi	35,36	58,87	56,03
Sumatera Selatan	55,04	73,58	69,22
Bengkulu	49,31	80,02	71,65
Lampung	47,23	66,89	61,41
Bangka Belitung	48,89	74,57	71,69
Kepulauan Riau	74,45	89,89	88,09
DKI Jakarta	93,67	96,54	96,35
Jawa Barat	32,81	61,96	56,97
Jawa Tengah	59,96	78,96	74,07
DI Yogyakarta	90,45	97,58	95,97
Jawa Timur	65,04	84,47	79,55
Banten	22,70	56,64	53,16
Bali	78,40	93,07	91,48
Nusa Tenggara Barat	38,87	58,68	52,18
Nusa Tenggara Timur	20,90	45,94	37,12
Kalimantan Barat	32,92	54,28	50,61
Kalimantan Tengah	35,34	54,36	51,99
Kalimantan selatan	36,07	65,35	62,44
Kalimantan Timur	50,20	79,02	75,24
Sulawesi Utara	60,44	79,62	75,98
Sulawesi Tengah	29,54	54,62	47,22
Sulawesi Selatan	32,72	58,37	53,11
Sulawesi Tenggara	19,13	39,04	33,49
Gorontalo	15,10	43,10	33,14
Sulawesi Barat	7,20	25,48	20,90
Maluku	24,93	46,30	38,23
Maluku Utara	11,79	34,66	31,31
Papua Barat	34,88	65,08	51,62
Papua	32,40	60,01	48,14
Indonesia	49,00	71,58	66,80

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 4.2.b. Persentase Penolong Persalinan Terakhir
Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2007**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	70,19	85,03	80,40
Sumatera Utara	72,51	86,83	84,00
Sumatera Barat	72,78	88,40	85,77
Riau	54,17	79,54	76,25
Jambi	44,70	69,81	66,77
Sumatera Selatan	60,34	77,53	73,49
Bengkulu	59,61	85,24	78,26
Lampung	56,94	76,35	70,93
Bangka Belitung	59,31	83,00	80,34
Kepulauan Riau	76,56	91,62	89,87
DKI Jakarta	94,99	97,82	97,63
Jawa Barat	38,72	66,55	61,79
Jawa Tengah	66,11	84,66	79,89
DI Yogyakarta	89,45	97,25	95,49
Jawa Timur	68,46	86,41	81,87
Banten	34,83	67,40	64,06
Bali	82,67	95,08	93,73
Nusa Tenggara Barat	57,48	75,91	69,87
Nusa Tenggara Timur	25,24	51,82	42,46
Kalimantan Barat	38,76	63,44	59,20
Kalimantan Tengah	46,99	62,91	60,92
Kalimantan selatan	45,95	74,99	72,10
Kalimantan Timur	58,13	83,37	80,07
Sulawesi Utara	70,17	86,27	83,22
Sulawesi Tengah	40,09	65,83	58,24
Sulawesi Selatan	44,04	67,59	62,76
Sulawesi Tenggara	31,19	52,23	46,36
Gorontalo	42,78	65,73	57,57
Sulawesi Barat	31,01	47,68	43,50
Maluku	27,41	49,47	41,13
Maluku Utara	19,44	41,15	37,97
Papua Barat	39,57	69,18	55,99
Papua	37,12	63,70	52,27
Indonesia	55,57	77,08	72,53

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 4.3. Persentase Pengguna Alat KB Menurut Provinsi
Tahun 2007**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	62,29	55,17	56,75
Sumatera Utara	63,59	60,55	60,88
Sumatera Barat	60,77	57,47	57,78
Riau	69,69	64,78	65,24
Jambi	72,52	69,49	69,74
Sumatera Selatan	69,57	66,39	66,93
Bengkulu	74,23	67,73	69,03
Lampung	72,56	66,69	67,89
Bangka Belitung	71,28	67,58	67,85
Kepulauan Riau	66,63	58,84	59,63
DKI Jakarta	66,00	58,69	59,02
Jawa Barat	66,52	63,72	64,05
Jawa Tengah	68,47	65,06	65,69
DI Yogyakarta	62,90	61,00	61,35
Jawa Timur	70,42	66,29	67,03
Banten	56,68	64,06	63,57
Bali	76,63	67,40	67,95
Nusa Tenggara Barat	64,72	58,72	60,00
Nusa Tenggara Timur	57,29	54,04	54,78
Kalimantan Barat	73,91	65,46	66,37
Kalimantan Tengah	70,49	71,61	71,52
Kalimantan selatan	70,28	68,31	68,41
Kalimantan Timur	66,33	64,34	64,53
Sulawesi Utara	70,56	59,48	60,64
Sulawesi Tengah	67,12	64,15	64,75
Sulawesi Selatan	65,77	57,89	58,87
Sulawesi Tenggara	64,07	59,05	59,97
Gorontalo	70,60	64,88	66,38
Sulawesi Barat	54,60	61,86	60,67
Maluku	58,61	55,98	56,50
Maluku Utara	62,46	59,36	59,62
Papua Barat	48,01	54,62	52,63
Papua	58,49	60,51	59,86
Indonesia	67,69	63,87	64,42

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 5.1.a. Persentase Rumahtangga Yang Menggunakan Air Bersih,
Jamban Sendiri/Bersama Menurut Provinsi Tahun 2007**

Miskin		
Provinsi	Air Bersih	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	25,21	42,85
Sumatera Utara	28,45	57,00
Sumatera Barat	22,95	37,02
Riau	14,64	71,91
Jambi	22,71	47,30
Sumatera Selatan	30,38	55,18
Bengkulu	16,39	43,49
Lampung	31,27	66,69
Bangka Belitung	34,73	32,62
Kepulauan Riau	44,61	75,75
DKI Jakarta	79,91	76,69
Jawa Barat	24,38	50,20
Jawa Tengah	35,75	52,90
DI Yogyakarta	49,86	81,07
Jawa Timur	46,14	56,81
Banten	20,83	26,00
Bali	37,69	44,48
Nusa Tenggara Barat	35,66	24,61
Nusa Tenggara Timur	14,33	62,29
Kalimantan Barat	6,71	37,90
Kalimantan Tengah	18,41	45,47
Kalimantan selatan	31,90	43,89
Kalimantan Timur	33,08	65,23
Sulawesi Utara	29,89	58,07
Sulawesi Tengah	23,39	32,56
Sulawesi Selatan	27,06	43,84
Sulawesi Tenggara	34,14	48,58
Gorontalo	33,86	21,31
Sulawesi Barat	31,56	33,10
Maluku	35,08	30,46
Maluku Utara	21,34	22,78
Papua Barat	28,88	36,57
Papua	11,33	40,05
Indonesia	32,98	51,87

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 5.1.b. Persentase Rumahtangga Yang Menggunakan Air Bersih,
Jamban Sendiri/Bersama Menurut Provinsi Tahun 2007**

Tidak Miskin		
Provinsi	Air Bersih	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	40,26	63,19
Sumatera Utara	50,11	81,39
Sumatera Barat	48,67	64,32
Riau	36,90	90,24
Jambi	44,08	75,05
Sumatera Selatan	49,17	75,48
Bengkulu	30,02	75,11
Lampung	42,22	77,32
Bangka Belitung	49,76	68,14
Kepulauan Riau	71,48	93,82
DKI Jakarta	80,38	93,63
Jawa Barat	44,11	77,73
Jawa Tengah	53,69	74,81
DI Yogyakarta	69,88	93,45
Jawa Timur	59,92	75,53
Banten	46,82	68,68
Bali	65,22	81,68
Nusa Tenggara Barat	49,64	54,94
Nusa Tenggara Timur	31,64	73,91
Kalimantan Barat	17,23	67,11
Kalimantan Tengah	32,66	66,90
Kalimantan selatan	55,14	73,66
Kalimantan Timur	67,33	87,49
Sulawesi Utara	49,09	80,87
Sulawesi Tengah	37,30	57,85
Sulawesi Selatan	50,93	74,09
Sulawesi Tenggara	46,98	68,33
Gorontalo	45,99	55,88
Sulawesi Barat	36,79	50,98
Maluku	46,25	60,78
Maluku Utara	38,89	56,35
Papua Barat	51,22	66,45
Papua	36,62	66,83
Indonesia	51,16	76,06

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

**Tabel 5.1.c. Persentase Rumahtangga Yang Menggunakan Air Bersih,
Jamban Sendiri/Bersama Menurut Provinsi Tahun 2007**

Miskin + Tidak Miskin		
Provinsi	Air Bersih	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	36,96	58,73
Sumatera Utara	47,82	78,81
Sumatera Barat	46,29	61,79
Riau	34,90	88,60
Jambi	42,36	72,82
Sumatera Selatan	46,23	72,30
Bengkulu	27,51	69,29
Lampung	40,11	75,28
Bangka Belitung	48,64	65,50
Kepulauan Riau	69,33	92,38
DKI Jakarta	80,36	93,06
Jawa Barat	41,97	74,74
Jawa Tengah	50,71	71,17
DI Yogyakarta	66,93	91,62
Jawa Timur	57,63	72,43
Banten	45,05	65,77
Bali	63,76	79,70
Nusa Tenggara Barat	46,72	48,61
Nusa Tenggara Timur	27,75	71,30
Kalimantan Barat	16,19	64,20
Kalimantan Tengah	31,65	65,39
Kalimantan selatan	53,89	72,06
Kalimantan Timur	64,48	85,64
Sulawesi Utara	47,43	78,90
Sulawesi Tengah	34,79	53,28
Sulawesi Selatan	48,26	70,70
Sulawesi Tenggara	44,80	64,98
Gorontalo	43,23	48,02
Sulawesi Barat	36,03	48,36
Maluku	43,54	53,41
Maluku Utara	37,32	53,35
Papua Barat	44,25	57,14
Papua	28,12	57,82
Indonesia	48,72	72,81

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute, 2002, *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*, BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2002, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2003, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2003, *Data Kemiskinan untuk Penghitungan Dana Alokasi Umum (laporan intern)*, BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2004, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2007, *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.